

INTERVENSI NEGARA DALAM KONFLIK HKBP

(Suatu Studi Mengenai Hubungan Agama dan Negara)

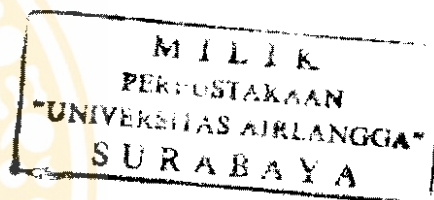
SKRIPSI

KK

Fis. P 104 / 97

Tar

i



Di susun oleh :

TOGU D.H. TARIHORAN

NPM. 079113037

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

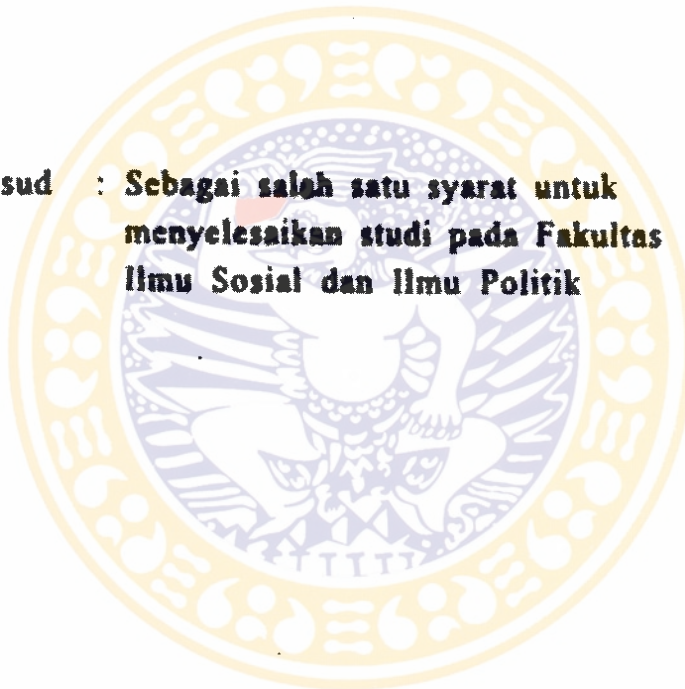
Semester Gasal tahun 1996/1997

INTERVENSI NEGARA DALAM KONFLIK HKBP

(Suatu Studi Mengenai Hubungan Agama dan Negara)

SKRIPSI

Maksud : Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Di susun oleh :

TOGU D.H. TARIHORAN

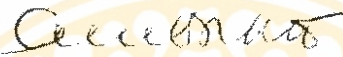
NPM. 079113037

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Semester Gasal tahun 1996/1997

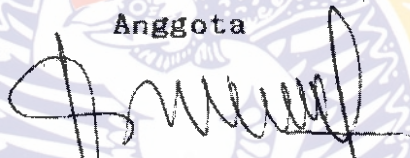
Skripsi ini telah diuji
pada tanggal 14 Januari 1997
oleh tim penguji

Ketua Tim Penguji



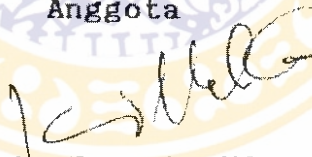
DR. Ramlan Surbakti
NIP. 130701133

Anggota



Budi Prasetyo, M. Si
NIP. 131018096

Anggota



Kris Nugroho, MA
NIP. 131801408

terkena langsung akibat dari konflik . atau oknum yang terlibat dalam setiap kejadian , baik itu merupakan data yang berasal dari masyarakat dan negara atau kalangan lain yang mau peduli dengan masalah ini seperti YLEHI ataupun PGI.

Penelitian ini pada akhirnya mendapatkan suatu gambaran bahwa faktor yang menyebabkan Negara terlibat didalam atau intervensi dalam konflik HKBP adalah merupakan kepentingan politik dan ekonomi untuk mendukung status quo dan mendukung ide *developmentalisme* dengan demikian harapan dari pemerintah adalah menekan konflik seminimal mungkin untuk mencegah oposisi dengan menerapkan jaringan korporatisnya dengan membentuk kelompok masyarakat yang dipilih langsung oleh pemerintah hierarki kekuasaan dan kepemimpinannya.

Lalu penerapannya di daerah juga demikian. pemerintahan yang dibentuk tadi diharapkan untuk mengatasi pimpinan-pimpinan daerah. dengan demikian diadakan mutasi untuk mengganti kepengurusan di daerah dengan tujuan menjaga munculnya kekuatan-kekuatan baru yang dapat melawan kepemimpinan bentukan. Juga dengan menciptakan jaringan birokrasi yang rumit sehingga masyarakat bingung. siapa sebenarnya yang berwenang untuk mengatasi permasalahan ini. Dan fenomena terjadinya pengkooptasian dapat dilihat dalam kasus ini.

Kesemua "kebijakan" itu diadakan untuk mencapai apa yang disebut oleh negara sebagai Stabilitas Nasional dan karenanya setiap konflik dan pergolakan dianggap sebagai instabilitas. Mempertahankan status Quo adalah jalan satu-satunya untuk mewujudkan stabilitas tersebut.

Pada akhirnya kembali pada keterbatasan penulis dalam menyajikan data yang akurat. dan kekurangan yang ada diharapkan sebagai kritik dan pembahasan selanjutnya dari pihak lain untuk lebih menuntaskan permasalahan dan konflik HKBP ini.